



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Jakarta Selatan 12550 Tlp: 021-7231948
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Kota Bekasi Telp: 021-88955882
Website: www.fh.ubharajaya.ac.id Email: fh@ubharajaya.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 427 /V/2025/FH-UBJ

Tentang

PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM SEMESTER GENAP T.A. 2024/2025

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa dalam menyusun Tugas Akhir/Skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.
 2. Surat Tugas dengan Nomor : ST/1080/X/2024/FH-UBJ Tertanggal 16 Oktober 2024 sudah habis masa berlakunya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 5. Kep Rektor No. 041 Tahun 2022 Tentang Buku Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
 6. Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun Akademik 2024/2025.
 7. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Genap T.A. 2024/2025.

MENUGASKAN :

- Kepada :
1. **Diana Fitriana, S.H., M.H**
 2. **Sri Wahyuni, S.H., M.H**
- Untuk :
1. Melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum.
Tersebut No. 1 melaksanakan tugas sebagai Pembimbing 1/Materi
Tersebut No. 2 melaksanakan tugas sebagai Pembimbing 2/Teknis
 2. Bimbingan dilaksanakan terhadap mahasiswa:

Nama : SYAFIKA RANDRA
NPM : 202110115036
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN KONSUMEN PEMILIK PERUMAHAN ATAS TINDAKAN WANPRESTASI TERHADAP PEMENUHAN FASILITAS UMUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN
 3. Kegiatan bimbingan dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini, dan agar mahasiswa menghubungi dan berkonsultasi dengan pembimbing.
 4. Pelaksanaan penulisan proposal skripsi dan penelitian dimulai sejak ditandatangani Surat Tugas ini.
 5. Melaksanakan bimbingan proposal 3 (tiga) kali dan bimbingan skripsi minimal 8 (delapan) kali sampai selesainya penyusunan skripsi.
 6. Surat Tugas ini berlaku selama maksimal 2 semester dan berakhir pada akhir semester Ganjil 2025/2026

Selesai

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Mei 2025

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. St. Laksanto Utomo., S.H., M.Hum
NIP. 2406650

**GANTI RUGI KEPADA WARGA ATAS PENEMBOKAN
JALAN DI PASAR 1 KELURAHAN TANJUNG SARI
KOTA MEDAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERDATA**

SKRIPSI

Oleh :

SYAFIKA RANDRA

202110115036



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2025**

**GANTI RUGI KEPADA WARGA ATAS PENEMBOKAN
JALAN DI PASAR 1 KELURAHAN TANJUNG SARI
KOTA MEDAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERDATA**

SKRIPSI

Oleh :
SYAFIKA RANDRA
202110115036



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi	: Ganti rugi kepada warga atas penembakan jalan di pasar 1 kelurahan tanjung sari kota medan dalam perspektif hukum perdata
Nama Mahasiswa	: Syafika Randra
Nomor Pokok Mahasiswa	: 202110115036
Program Studi/Fakultas	: Ilmu Hukum/Hukum

Jakarta, 26 Juli 2025

MENYETUJUI

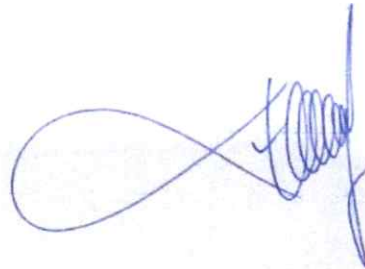
Pembimbing I



Diana Fitriana, S.H.,M.H.

NIDN. 0424039003

Pembimbing II



Sri Wahyuni, S.H.,M.H.

NIDN.0322078304

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Ganti rugi kepada warga atas penembakan
jalan di pasar 1 kelurahan tanjung sari kota
medan dalam perspektif hukum perdata
Nama Mahasiswa : Syafika Randra
Nomor Pokok Mahasiswa : 202110115036
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juli 2025

Jakarta, Juli 2025

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si., CTA

NIDK.9990295046

Penguji I : Diana Fitriana, S.H., M.H

NIDN.0424039003

Penguji II : Sri Wahyuni, S.H., M.H

NIDN. 0322078304



Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H.

NIDN. 0326078902



Prof. Dr. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.

NIDK. 8976950022

ABSTRAK

Syafika Randra 202110115036 “ganti rugi kepada warga atas penembokan jalan di pasar 1 kelurahan tanjung sari kota medan dalam perspektif hukum perdata” Penembokan jalan fasilitas umum yang menghalangi akses masyarakat dapat dikategorikan sebagai PMH karena melanggar hak akses publik, menyebabkan kerugian, dan bertentangan dengan peraturan tentang penggunaan jalan umum. Apabila penyelesaian melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana tersebut di atas tidak mencapai kesepakatan, maka ketidak sepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis. Selanjutnya dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa apabila terdapat perbuatan melawan hukum atas penembokan jalan dan mengetahui tentang ganti kerugian terhadap warga atas penembokan jalan berdasarkan perspektif hukum perdata. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penembokan jalan Padaputusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PN Mdn yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Nomor 152/Pdt/2024/PTMDN merupakan PMH karena melanggar hak akses publik, menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi penggugat dan masyarakat. Penyelesaian sengketa melalui litigasi mencerminkan keadilan distributif (Aristoteles), prosedural (John Rawls), dan utilitarian (Jeremy Bentham) dengan perintah pembongkaran tembok, permintaan maaf publik, dan dwangsom. Namun, tuntutan ganti rugi ditolak karena kurangnya bukti konkret sesuai Pasal 184 KUHPperdata. Penelitian ini menyarankan optimalisasi mediasi, penguatan bukti kerugian, dan pengembangan standar penilaian kerugian immateriil untuk mendukung keadilan dan kepastian hukum dalam kasus serupa.

Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Penembokan Jalan, Hukum Perdata, Ganti Rugi, Penyelesaian Sengketa.

ABSTRACT

Syafika Randra 202110115036 *“compensation to residents for road walling in market 1, tanjung sari village, medan city from a civil law perspective”*

The walling off of a public facility that obstructs public access can be categorized as a Public Road Harassment (PMH) because it violates the public's right of access, causes harm, and violates regulations regarding the use of public roads. If a settlement through amicable or deliberation as mentioned above fails to reach an agreement, the disagreement must be stated in writing. Furthermore, the dispute can be resolved out of court or through the courts by selecting one of the dispute resolution clauses.

The purpose of this research is to determine the dispute resolution process for unlawful acts involving road walling and to determine compensation for residents due to road walling, based on a civil law perspective. This research method utilizes normative juridical research, employing a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach.

The results indicate that the road walling in Decision Number 204/Pdt.G/2023/PN Mdn, upheld by the High Court Number 152/Pdt/2024/PTMDN, constitutes a Public Access Rights Act (PMH) because it violates the right of public access and causes material and immaterial losses to the plaintiff and the public. Dispute resolution through litigation reflects distributive justice (Aristotle), procedural justice (John Rawls), and utilitarian justice (Jeremy Bentham) with an order to dismantle the wall, a public apology, and a public order. However, the claim for compensation was rejected due to a lack of concrete evidence, as stipulated in Article 184 of the Civil Code. This research suggests optimizing mediation, strengthening evidence of losses, and developing standards for assessing immaterial losses to promote justice and legal certainty in similar cases.

Keywords: Unlawful Acts, Road Blocking, Civil Law, Compensation, Dispute Resolution